ANALISIS PENERAPAN SPT MASA PPN DAN HUBUNGANNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT. DUTA FIRZA

Oleh
Darmansyah, S.E., M.BA., M.Pd.
Hafifa

*Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta
Gedung Sentra Kramat Jl. Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat 10450
Telp. 021 – 31904598 Fax. 021 - 31904599*

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu pendapatan yang utama di Indonesia yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Untuk membiayai kegiatan dan kebutuhan negara, maka pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, salah satu cara untuk membiayai kebutuhan negara diperlukan sumber dana yang bersifat rutin yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Untuk itu, pemerintah memberikan suatu peraturan guna meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, salah satunya adalah melalui Pajak Pertambahan Nilai.

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah self assessment system. Dengan sistem pemungutan pajak self assessment yang berarti perhitungan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak, maka pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dari berbagai jenis pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara.

PPN merupakan jenis penerimaan pajak yang didasarkan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang terbaru yaitu Undang-Undang No.42 tahun 2009. Oleh karena itu, setiap wajib pajak diwajibkan untuk mencatat seluruh jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak setiap bulannya.

Keyword : Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak dan Penerimaan Negara

PENDAHULUAN

Pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor perpajakan. Salah satunya yaitu dengan melakukan berbagai pembaharuan dibidang perpajakan termasuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dengan dilakukannya pencatatan tersebut maka akan memudahkan dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Besarnya PPN yang harus dibayar perusahaan ditentukan oleh perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan perhitungan PPN sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan didalam melakukan pembayaran maupun pelaporan SPT Masa PPN, sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus memahami betul tata cara penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

PT. Duta Firza adalah distributor produk Ashcroft di Indonesia untuk peralatan pengatur tekanan dan suhu. Kegiatan utamanya adalah perdagangan yaitu menjual produk berupapressure & temperature instrument. Oleh karena itu, sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT. Duta Firza berkewajiban untuk membuat Faktur Pajak karena Faktur Pajak merupakan bukti yang menjadi sarana pelaksanaan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai setiap bulannya.

Berdasarkan bagian latar belakang, peneliti dilakukan pengamatan terhadap perhitungan, penyeteroran, pelaporan, dan pencatatan SPT Masa PPN pada PT. Duta Firza. Penelitian ini menarik karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu pengeluaran pajak yang nilainya cukup besar yang harus disetor ke Kas Negara oleh PT. Duta Firza.

IDENTIFIKASI MASALAH

Agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas sehingga tujuan akhir pun dapat sesuai dengan tujuan awal, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan pada :

1. Bagaimana perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Duta Firza, Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai?
2. Bagaimana pencatatan akuntansi terhadap PPN yang dilakukan pada PT. Duta Firza?
3. Bagaimana hubungan laporan SPT Masa PPN dengan laporan keuangan PT. Duta Firza?

BATASAN MASALAH

Agar penelitian lebih obyektif dan terarah, maka dalam peneliti tugas akhir ini terbatas pada perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai bulan Desember tahun 2010. Ketentuan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini mengacu pada UU PPN No.42 tahun 2009.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan data-data yang berhubungan dengan kajian penelitian, yaitu bersumber dari :

1. Studi Lapangan (*field research*)
Studi lapangan dilakukan dengan peninjauan langsung melalui kerja praktik untuk mengumpulkan data yang berupa Faktur Pajak, formulir SPT Masa PPN, SSP, bukti lapor pajak, dan laporan keuangan. Adapun teknik dalam pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan secara sistematis, sehingga data yang didapat

mempunyai kebenaran atau keabsahan sehingga peneliti dapat mempertanggungjawabkan penelitian tugas akhir ini.

2. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berasal dari buku-buku dan tulisan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2006:2), para ahli memberikan batasan tentang pajak, di antaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991:2). Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya seperti menurut Rochmat. Soemitro dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Fungsi Pajak

Menurut Mulyo Agung dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2007:3), pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah dan rokok.

Menurut Mulyo Agung dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2007:11), pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongan, sifat, dan pemungutannya.

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh yaitu Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh yaitu Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip :
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Sebagai contoh yaitu Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Sebagai contoh yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sebagai contoh yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sebagai contoh yaitu pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.

Sistem Pajak

Menurut Mulyo Agung dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2007:11), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

- a. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sebagai contoh yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Ciri-ciri *Official Assessment System* :
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sebagai contoh yaitu Pajak Penghasilan.
- c. *Withholding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sebagai contoh yaitu bank memotong pajak atas bunga tabungan atau deposito.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak adalah pihak yang diberikan hak dan kewajiban di bidang perpajakan atau suatu objek pajak. Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, dan nilai impor adalah :

1. Harga Jual
Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Apabila PKP selain menerbitkan Faktur Pajak juga menerbitkan faktur penjualan, maka potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut juga potongan harga yang tercantum dalam faktur penjualan. Tidak termasuk dalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya, yang diberikan dalam rangka menjualkan Barang Kena Pajak.
2. Penggantian
Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena Penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak

termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Ekspor
Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
4. Nilai Impor
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM. Nilai impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight* (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.

Nilai Penyerahan yang Menggunakan Valuta Asing

Apabila terjadi penyerahan BKP dan atau JKP yang pembayarannya ternyata dilakukan dengan menggunakan valuta asing, maka sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 1994 diatur :

1. Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku sesuai Keputusan Menteri Keuangan pada saat Faktur Pajak dibuat;
2. Terhadap penyerahan BKP dan atau JKP dilakukan kepada pemungut PPN, besarnya pajak yang terutang harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs yang berlaku sesuai Keputusan Menteri Keuangan pada saat pemungut PPN melakukan pembayaran.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak sebesar 0% (nol persen). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

TEMPAT DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Tempat Pajak Terutang

Tempat pajak terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP di dalam daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP. Apabila pengusaha

mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, maka setiap tempat tersebut merupakan tempat terutang pajak, dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja satu kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk tempat-tempat pajak terutang tersebut cukup satu Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Atas permohonan tertulis dari pengusaha satu kali pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang. Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari satu tempat kegiatan usaha, maka pengusaha kena pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat terutang pajak.

Saat Terutangnya Pajak

Pemungutan PPN pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Apabila dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran.

Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

Jika pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Oleh karena itu, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. Apabila pembayarannya dilakukan sebagian-sebagian atau merupakan pembayaran uang muka sebelum dilakukan penyerahan, maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran sebagian-sebagian atau pembayaran uang muka tersebut.

Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, bagi orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak

dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Namun demikian, apabila Faktur Pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut, jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus disetorkan ke Kas Negara.

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dikenal adanya 3 (tiga) macam Faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan Faktur Pajak Gabungan.

Masalah Faktur Pajak sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak ini harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun, untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas Penyerahan Barang Kena Pajak Terutang PPnBM.

Menyimpang dari ketentuan di atas, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang dapat digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Hal ini beralasan :

1. Faktur Penjualan yang digunakan pengusaha telah dikenal masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak, contohnya yaitu kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.
2. Adanya bukti pungutan pajak itu harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak yaitu pihak yang menyerahkan BKP atau JKP, berada di luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak.

Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam masa pajak yang sama.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.

$$\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} = \text{Pajak yang harus disetor ke Kas Negara}$$

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Tempat Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Faktur Pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku antaralain alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus sama dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengukuhan.

Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain, selain tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak maupun secara jabatan.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak "A" yang kantor pusatnya di Jakarta dan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir memiliki pabrik yang terletak di kota Solo dan telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Solo. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam rangka pengimporan Barang Kena Pajak menggunakan NPWP Kantor Pusat Jakarta. Maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Pengusaha Kena Pajak di Solo dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang tercantum dalam dokumen impor tersebut.

Kompensasi Kelebihan Pajak Masukan

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Dapat terjadi dalam suatu masa pajak terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali, tetapi dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun, apabila perusahaan tersebut bubar sebelum tahun buku terakhir, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat diminta kembali pada saat pembubaran perusahaan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran baru diberikan setelah dilakukan pemeriksaan.

Contoh :

Masa Pajak Mei 2010 :

Pajak Keluaran	= Rp 2.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp 4.500.000,00</u> (-)
Pajak yang lebih dibayar	= Rp 2.500.000,00
	=====

Pajak yang lebih dibayar tersebut tidak dapat diminta kembali, tetapi dapat dikompensasikan pada Masa Pajak Juni 2010.

Masa Pajak Juni 2010 :

Pajak Keluaran	= Rp 3.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp 2.000.000,00</u> (-)
Pajak yang harus dibayar	= Rp 1.000.000,00
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 2010	= <u>Rp 2.500.000,00</u> (-)
Pajak yang lebih dibayar Juni 2010	=Rp 1.500.000,00

Apabila perusahaan tersebut pada bulan Juni 2010 bubar, kelebihan pembayaran pajak dalam bulan Juni 2010 baru dapat dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan.

TEMPAT DAN SAAT PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PPN

Tempat Pembayaran atau Penyetoran Pajak

1. Kantor Pos dan Giro.
2. Bank Pemerintah, kecuali BTN.

3. Bank Pembangunan Daerah.
4. Bank Devisa.
5. Bank-bank lain penerima setoran pajak.
6. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khusus untuk import tanpa LKP.

Saat Pembayaran atau Penyetoran PPN

Menurut Pasal 15A UU Nomor 42 Tahun 2009, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

LAPORAN KEUANGAN

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Analisis Kritis atas Laporan Keuangan (2009:105), Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah Neraca atau Laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan.

LAPORAN NERACA

Laporan neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu. Laporan ini bisa disusun setiap saat dan merupakan opname situasi posisi keuangan pada saat itu. Isi dari Laporan Neraca dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset atau Harta
Aset adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan misalnya kas, persediaan, aktiva tetap, aktiva yang tak berwujud, dan lain-lain.
2. Kewajiban
Kewajiban adalah kewajiban ekonomis dari suatu perusahaan yang diakui dan dinilai sesuai prinsip akuntansi. Kewajiban disini termasuk juga saldo kredit yang ditunda yang bukan merupakan utang atau kewajiban.
3. Modal Pemilik atau *Equity*
Equity adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan *Equity* adalah modal pemilik.

LAPORAN LABA RUGI

LAPORAN LABA RUGI ADALAH JUMLAH YANG BERASAL DARI PENGURANGAN HARGA POKOK PRODUKSI, BIAYA LAIN, DAN KERUGIAN DARI PENGHASILAN ATAU PENGHASILAN OPERASI. ELEMEN LAPORAN LABA RUGI TERDIRI DARI :

1. *Revenue*
Revenue adalah hasil dari penjualan barang atau pemberian jasa yang dibebankan kepada langganan, atau mereka yang menerima jasa. Suatu penghasilan akan diakui sebagai pendapatan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang dan jasa itu selesai.
2. *Expense*
Expense adalah semua biaya yang telah dikenakan dan dapat dikurangkan pada penghasilan. Biaya biasanya dibagi dalam tiga golongan yaitu biaya yang dihubungkan dengan periode itu, biaya yang dihubungkan dengan periode tertentu yang tidak

dikaitkan dengan penghasilan, dan biaya yang karena alasan praktis tidak dapat dikaitkan dengan periode manapun.

PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT. DUTA FIRZA

PT. Duta Firza telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 25 Maret 2002 di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua, dengan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) 01.310.066.4-018.000 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu nomor 01.310.066.4-018.000 dengan KLU yaitu 61500 – Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Oleh karena itu, PT. Duta Firza mempunyai kewajiban dalam hal memenuhi hak dan kewajiban perpajakan yaitu memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM terutang. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Perusahaan menggunakan Faktur Pajak Standar untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

FAKTUR PAJAK YANG DIGUNAKAN PT. DUTA FIRZA

PT. Duta Firza dalam membuat atau menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan sebagai bukti pemungutan pajak adalah Faktur Pajak Standar, yang selalu disertakan dalam setiap penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Standar merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana pengkreditan Pajak Masukan. Faktur jenis ini dapat diterbitkan apabila Pengusaha Kena Pajak, pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa Kena Pajak mempunyai identitas yang lengkap. Isi dari Faktur Standar adalah :

1. Kode dan nomor seri Faktur Pajak.
2. Identitas Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut, yang terdiri dari nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Identitas dari pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang terdiri dari nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
4. Nomor urut, nama Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, harga jual/penggantian/uang muka/termin, jumlah harga jual/penggantian/uang muka/termin, potongan harga, uang muka yang telah diterima, Dasar Pengecualian Pajak, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tanggal pembuatan faktur pajak, nama, jabatan, tanda tangan orang yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak Standar yang dibuat oleh PT. Duta Firza sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu :

1. Lembar ke-1 :
Untuk pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagai bukti Pajak Masukan.
2. Lembar ke-2 :
Untuk penjual Barang Kena Pajak atau Pemberi Jasa Kena Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran.
3. Lembar ke-3 :
Untuk penjual Barang Kena Pajak atau Pemberi Jasa Kena Pajak sebagai arsip.

PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PAJAK MASUKAN

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau penerimaan JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.

Tabel .1: Perolehan BKP/JKP PT. Duta Firza

Nama	NPWP	Tgl	No. Faktur Pajak	DPP	PPN
PT.Jobstreet Indonesia	02.492.347.6-076.000	26/11/10	010.000-10.00007583	Rp 300.000	Rp 30.000
PT.Nettocyber Indonesia	02.058.952.9-058.000	01/12/10	010.000-10.00006174	Rp 2.000.000	Rp 200.000
PT.Astra Graphia Tbk	01.307.261.6-054.000	09/12/10	010.000-10.00172475	Rp 873.360	Rp 87.336
Indonesia Exhibiton Services	21.064.360.7-071.000	20/12/10	010.000-10.00000032	Rp 2.232.000	Rp 223.200
TOTAL				Rp 5.405.360	Rp 540.536

Pada setiap pembelian BKP/JKP, PT. Duta Firza menerima Faktur Pajak Standar dari PKP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar. Perolehan BKP/JKP PT. Duta Firza selama bulan Desember 2010 dapat dilihat pada tabel .1.

Atas dasar tersebut, maka dikenakan PPN sebesar 10% sesuai dengan peraturan Undang-Undang PPN. Maka, BKP/JKP tersebut dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN bulan Desember 2010. Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka besarnya Pajak Masukan PT. Duta Firza untuk bulan Desember 2010 yaitu sebesar Rp 540.536, nilai tersebut diperoleh dari perhitungan 10% dari total Dasar Pengenaan Pajak PPN.

PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PAJAK KELUARAN

Pajak Keluaran yang dipungut oleh perusahaan berasal dari PPN atas Penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak. Pada PT. Duta Firza yang menjadi Barang atau Jasa Kena Pajak ini yaitu produk *pressure and temperature instrument*. Prosedur pembuatan *invoice* dan Faktur Pajak dibuat oleh bagian admin. Dimana *invoice* dan Faktur Pajak tersebut dibuat apabila ada PO (*Purchase Order*). Pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut dibuat berdasarkan tanggal *commercial invoice* sehingga antara *commercial invoice* dan Faktur Pajak Standar tidak ada perbedaan tanggal.

Besarnya pajak yang dipungut oleh perusahaan setiap bulan tidak sama. Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka besarnya Pajak Keluaran PT. Duta Firza untuk bulan Desember 2010 yaitu sebesar Rp 15.526.238. Nilai tersebut didapat dari perhitungan 10% dari total Dasar Pengenaan Pajak PPN.

PROSES PERHITUNGAN PENGKREDITAN PPN PT. DUTA FIRZA

Semua transaksi penjualan barang dagang akan dibuat rekapitulasi PPN setiap bulannya termasuk transaksi pembelian barang atau jasa yang berkaitan dengan Pajak Masukan PT. Duta Firza. (terlampir)

PROSES PENYETORAN PPN PT. DUTA FIRZA

Pada setiap akhir bulan bagian *accounting* akan membuat laporan mengenai pajak yang dipungut, pemungut, dan tanpa PPN serta Pajak Masukan yang dapat dikreditkan perusahaan. Dari laporan tersebut akan menimbulkan status kurang bayar apabila Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan sehingga perusahaan harus membayar kekurangan pajak tersebut melalui bank atau kantor pos. Pada masa pajak Desember 2010, perusahaan memiliki status kurang bayar sebesar Rp 14.985.702 sehingga kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat akhir bulan berikutnya melalui Bank dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

PROSES PENGISIAN SPT MASA PPN PT. DUTA FIRZA**DAFTAR PENYERAHAN BARANG DAN JASA****TERUTANG PPN****EKSPOR**

Untuk tarif PPN barang ekspor adalah 0%.Oleh karena tidak melakukan ekspor, maka DPP = 0. Jadi, $0 \times 0\% = 0$.

PENYERAHAN YANG PPN-NYA HARUS DIPUNGUT SENDIRI

Diisi berdasarkan total DPP dan PPN dengan Faktur Pajak kode 01.

PENYERAHAN YANG PPN-NYA DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN

Diisi berdasarkan total DPP dan PPN dengan Faktur Pajak kode 03.

PENYERAHAN YANG PPN-NYA TIDAK DIPUNGUT

Oleh karena tidak melakukan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, maka diisi dengan 0.

PENYERAHAN YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

Oleh karena tidak melakukan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka diisi dengan 0.

TIDAK TERUTANG PPN

Diisi berdasarkan total seluruh DPP yang tidak terutang PPN.

JUMLAH SELURUH PENYERTAAN

Diisi berdasarkan total seluruh penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN dan tidak terutang PPN.

PENGHITUNGAN PPN KURANG ATAU LEBIH BAYAR, UNTUK DESEMBER 2010

Perhitungan PPN kurang atau (lebih) bayar untuk masa Desember 2010 dapat dilihat pada tabel .2.

Tabel .2: Perhitungan PPN kurang atau (lebih) bayar

Keterangan	PPN
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 15.526.238
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(Rp 540.536)
PPN yang kurang atau (lebih) bayar	Rp 14.985.702

PROSES PELAPORAN SPT MASA

Setelah dilakukan penyetoran PPN dengan SSP, maka kewajiban selanjutnya adalah melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar sebagai PKP. Dalam hal ini, PT. Duta Firza melaporkan SPT Masa PPN untuk masa bulan Desember 2010 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua yaitu tanggal 25 Januari 2011.

Formulir yang dilaporkan, yaitu formulir SPT Masa PPN 1108 yang terdiri dari formulir 1108A sampai dengan 1108B dan SSP PPN lembar ke 3 (tiga). Formulir SPT Masa PPN

induk beserta lampiran dibuat rangkap 2 oleh perusahaan. Lembar 1 untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan lembar 2 untuk arsip wajib pajak itu sendiri.

PROSES PENCATATAN AKUNTANSI PADA PT. DUTA FIRZA

PROSES PENCATATAN PPN MASUKAN (VAT-IN)

Proses Pencatatan PPN Masukan pada PT. Duta Firza dilakukan berdasarkan Faktur Pajak Standar yang diterima dari supplier bersamaan dengan *invoice*. Saat *invoice* beserta Faktur Pajaknya diterima maka akan dibuatkan rekapitulasi oleh bagian *accounting*. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam penghitungan Pajak Masukan setiap bulannya. Berikut adalah transaksi yang berkaitan dengan Pajak Masukan (SPT Masa PPN) PT. Duta Firza selama bulan Desember 2010, dapat dilihat pada tabel .3.

Tabel .3: Transaksi Pencatatan VAT-IN PT. Duta Firza

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
03/12/10	Biaya Iklan VAT-IN Bank Mandiri	Rp 300.000 Rp 30.000 -	- - Rp 330.000
03/12/10	Biaya Internet VAT-IN Bank Mandiri	Rp 2.000.000 Rp 200.000 -	- - Rp 2.200.000
15/12/10	Biaya Promosi dan Iklan VAT-IN Bank Mandiri	Rp 2.232.000 Rp 223.200 -	- - Rp 2.455.200
23/12/10	Biaya Copy VAT-IN Bank Mandiri	Rp 873.360 Rp 87.336 -	- - Rp 960.696

Dari transaksi di atas, maka total Pajak Masukan PT. Duta Firza untuk bulan Desember 2010, yaitu sebesar Rp 540.536.

PROSES PENCATATAN PPN KELUARAN (VAT-OUT)

Proses pencatatan PPN Keluaran pada PT. Duta Firza dilakukan berdasarkan Faktur Pajak yang telah dibuat oleh bagian admin dimana *invoice* dan Faktur Pajak tersebut telah disetujui oleh *customer*. Berikut adalah satu sample data dari tiga puluh sembilan data transaksi yang terjadi. Pencatatan yang dilakukan terhadap PT. Metito Indonesia dengan total order USD474 dan dikenakan PPN10% sebesar USD47,40 dengan kurs pajak yang berlaku saat itu adalah Rp 9.020,20. Pencatatan transaksi VAT-OUT PT. Duta Firza, dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel .4: Transaksi Pencatatan PPN Keluaran PT. Duta Firza

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10/12/10	Piutang PT. Metito Ind. Revenue Ashcroft VAT-OUT (@8.991)	Rp4.689.291 - -	- Rp 4.261.734 Rp 427.557

Kemudian saat diterima pembayaran dari PT. Metito Indonesia, maka jurnal dapat dilihat pada tabel .5.

Tabel .5: Transaksi Pencatatan Penerimaan Pembayaran

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
15/12/10	Bank Mandiri – USD Piutang PT. Metito Ind.	Rp 4.689.291 -	- Rp4.689.291

PROSES PENCATATAN PERHITUNGAN PENGKREDITAN PPN

Apabila proses penghitungan telah dilakukan maka pada akhir bulan perusahaan akan mencatat PPN Keluaran dan PPN Masukan tersebut. Pencatatan dilakukan pada jurnal voucher untuk tanggal 31 Desember 2010, dapat dilihat pada tabel .6.

Tabel .6: Transaksi Pencatatan Perhitungan Pengkreditan PPN

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/10	VAT-OUT VAT-IN PPN Terutang	Rp 15.526.238 - -	- Rp 540.536 Rp 14.985.702

PROSES PENCATATAN PENYETORAN PPN

Setelah dilakukannya pencatatan perhitungan pengkreditan PPN pada akhir bulan, maka pada bulan berikutnya yaitu tanggal 10 Januari 2011, PT. Duta Firza harus menyetorkan PPN kurang bayar tersebut. Jurnal yang dibuat oleh PT. Duta Firza, dapat dilihat pada tabel .7.

Tabel .7: Transaksi Pencatatan Penyetoran PPN

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
10/01/11	PPN Terutang Bank Mandiri	Rp 14.985.702 -	- Rp 14.985.702

REKONSILIASI PPN DENGAN NERACA

Didalam neraca dapat dilihat bahwa posisi keuangan perusahaan pada suatu saat yang terinci dalam kelompok aktiva, kewajiban, dan modal. Dalam menetapkan kebijakan atas jumlah pajak yang lebih bayar, PT. Duta Firza tidak melakukan restitusi pengembalian pajak melainkan melakukan kompensasi pajak ke masa pajak berikutnya. Perhitungan PPN yang kurang atau lebih bayar pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Januari status nihil
2. Februari status nihil
3. Februari pembetulan 1 status lebih bayar Rp 21.630.454
Pajak Keluaran sebesar Rp 544.953 lebih kecil dari pada Pajak Masukan yaitu sebesar Rp 22.175.407, sehingga mengakibatkan lebih bayar Rp 21.630.454. Atas kondisi lebih bayar tersebut, PT. Duta Firza mengkompensasikan kemas pajak berikutnya.
4. Maret status lebih bayar Rp 37.828.293
Pajak Keluaran sebesar Rp 2.520.160 lebih kecil dari pada Pajak Masukan sebesar Rp 18.718.000. Kemudian terdapat kompensasi kelebihan bulan lalu atas bulan Februari sebesar Rp 21.630.454, sehingga mengakibatkan lebih bayar Rp 37.828.293. Atas kondisi lebih bayar tersebut PT. Duta Firza mengkompensasikan kemas pajak berikutnya.
5. April status lebih bayar Rp 34.715.233
Pajak Keluaran sebesar Rp 6.395.817 lebih besar dari pada Pajak Masukan Rp 3.282.757, sehingga terdapat kurang bayar. Namun, pada masa pajak Maret terdapat lebih bayar sebesar Rp 37.828.293, sehingga jumlah pajak pada masa April menjadi lebih bayar Rp 34.715.233 {Rp 6.395.817 – (Rp 3.282.757 + Rp 37.828.293)}
6. April Pembetulan 1 status lebih bayar Rp 34.715.233
Pajak Keluaran sebesar Rp 6.395.817 lebih besar dari pada Pajak Masukan Rp 3.282.757, sehingga terdapat kurang bayar. Namun, pada masa pajak Maret terdapat lebih bayar sebesar Rp 37.828.293, sehingga jumlah pajak pada masa April menjadi lebih bayar Rp 34.715.233 {Rp 6.395.817 – (Rp 3.282.757 + Rp 37.828.293)}
7. April Pembetulan 2 status lebih bayar Rp 34.715.233
Pajak Keluaran sebesar Rp 6.395.817 lebih besar dari pada Pajak Masukan Rp 3.282.757, sehingga terdapat kurang bayar. Namun, pada masa pajak Maret terdapat lebih bayar sebesar Rp 37.828.293, sehingga jumlah pajak pada masa April menjadi lebih bayar Rp 34.715.233 {Rp 6.395.817 – (Rp 3.282.757 + Rp 37.828.293)}
8. Mei status Lebih bayar Rp 9.378.253
Pajak Keluaran sebesar Rp 25.626.368 lebih besar dari pada Pajak Masukan Rp 289.388. Karena masih terdapat kelebihan kompensasi masa pajak April Rp 34.715.233, maka jumlah pajak pada masa Mei menjadi lebih bayar Rp 9.378.253 {Rp 25.626.368 – (Rp 289.388 + Rp 34.715.233)}
9. Juni status lebih bayar Rp 4.044.747
Pajak Keluaran Rp 5.613.930 lebih besar dari Pajak Masukan Rp 280.424. Karena masih terdapat kelebihan kompensasi Rp 9.378.253, maka jumlah pajak pada masa Juni menjadi lebih bayar Rp 4.044.747 {Rp 5.613.930 – (Rp 280.424 + Rp 9.378.253)}

10. Juni Pembetulan 1 status lebih bayar Rp 4.044.747
Pajak Keluaran Rp 5.613.930 lebih besar dari Pajak Masukan Rp 280.424. Karena masih terdapat kelebihan kompensasi Rp 9.378.253, maka jumlah pajak pada masa Juni menjadi lebih bayar Rp 4.044.747 $\{(Rp\ 5.613.930 - (Rp\ 280.424 + Rp\ 9.378.253))\}$
11. Juli status kurang bayar Rp 1.998.691
Pajak Keluaran Rp 8.666.259, Pajak Masukan Rp 2.622.821, kompensasi kelebihan bulan Juni Rp 4.044.747, sehingga jumlah pajak pada masa Juli yaitu Rp 1.998.691 $\{Rp\ 8.666.259 - (Rp\ 2.622.821 + Rp\ 4.044.747)\}$
12. Juli pembetulan 1 status kurang bayar Rp 1.998.691
Pajak Keluaran Rp 8.666.259, Pajak Masukan Rp 2.622.821, kompensasi Rp 4.044.747, sehingga jumlah pajak pada masa Juli yaitu Rp 1.998.691 $\{Rp\ 8.666.259 - (Rp\ 2.622.821 + Rp\ 4.044.747)\}$
13. Agustus status kurang bayar Rp 13.401.866
Pajak Keluaran Rp 13.689.463, Pajak Masukan Rp 287.597, sehingga jumlah pajak pada masa Agustus yaitu Rp 13.401.866 $(Rp\ 13.689.463 - Rp\ 287.597)$
14. Agustus pembetulan 1 status kurang bayar Rp 13.401.866
Pajak Keluaran Rp 13.689.463, Pajak Masukan Rp 287.597, sehingga jumlah pajak pada masa Agustus yaitu Rp 13.401.866 $(Rp\ 13.689.463 - Rp\ 287.597)$
15. September status kurang bayar Rp 20.752.391
Pajak Keluaran Rp 21.036.667 lebih besar dari pada PPN Masukan Rp 284.276, sehingga jumlah pajak pada masa September yaitu Rp 20.752.391 $(Rp\ 21.036.667 - Rp\ 284.276)$
16. September pembetulan 1 status kurang bayar Rp 20.076.932
Pajak Keluaran Rp 20.361.208, Pajak Masukan Rp 284.276, SPT yang dibetulkan Rp 20.752.391, sehingga terdapat lebih bayar Rp 675.459 dan nilai lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak November.
17. Oktober status kurang bayar Rp 1.911.274
Pajak Keluaran Rp 2.204.982, Pajak Masukan Rp 293.708, sedangkan PT. Duta Firza menyetorkan dengan SSP sebesar Rp 2.284.035, sehingga terjadi lebih bayar Rp 372.761 itu dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
18. Oktober pembetulan 1 status kurang bayar Rp 1.911.274
Pajak keluaran Rp 2.204.982, Pajak masukan Rp 293.708, sedangkan PT. Duta Firza menyetorkan dengan SSP sebesar Rp 2.284.035, sehingga terjadi lebih bayar Rp 372.761 itu dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
19. November status kurang bayar Rp 11.297.980
Pajak Keluaran Rp 14.116.778, Pajak Masukan Rp 1.770.578, sedangkan masih terdapat kompensasi masa pajak sebelumnya Rp 372.761 dan kompensasi kelebihan PPN masa pajak September Rp 675.459 sehingga PPN yang harus dibayar untuk masa pajak November menjadi Rp 11.297.980 $\{(Rp\ 14.116.778 - (Rp\ 1.770.578 + Rp\ 372.761 + Rp\ 675.459))\}$.
20. November pembetulan 1 status kurang bayar Rp 11.297.980
Pajak Keluaran Rp 14.116.778, pajak masukan Rp 1.770.578, sedangkan masih terdapat kompensasi masa pajak sebelumnya Rp 372.761 dan kompensasi kelebihan PPN masa pajak September Rp 675.459, sehingga PPN yang harus dibayar untuk masa pajak November menjadi Rp 11.297.980 $\{(Rp\ 14.116.778 - (Rp\ 1.770.578 + Rp\ 372.761 + Rp\ 675.459))\}$.
21. Desember status kurang bayar Rp 14.985.702
Pajak Keluaran Rp 15.526.238, Pajak Masukan Rp 540.536, sehingga PPN yang harus dibayar untuk masa pajak Desember menjadi Rp 14.985.702 $(Rp\ 15.526.238 - Rp\ 540.536)$.

Berikut adalah daftar rekap perhitungan PPN yang kurang atau (lebih) bayar selama tahun 2010, dapat dilihat pada tabel .8.

Tabel .8: Rekap PPN Tahun 2010

Bulan	Status	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	Kompensasi Dari Masa Pajak Sebelumnya	Pajak Keluaran	Selisih Lebih/Kurang Bayar/Nihil
Januari	Normal	-	-	-	-
Februari	Normal	-	-	-	-
Februari	Pembetulan 1	22,175,407	-	544,953	(21,630,454)
Maret	Normal	18,718,000	21,630,454	2,520,160	(37,828,293)
April	Normal	3,282,757	37,828,293	6,395,817	(34,715,233)
April	Pembetulan 1	3,282,757	37,828,293	6,395,817	(34,715,233)
April	Pembetulan 2	3,282,757	37,828,293	6,395,817	(34,715,233)
Mei	Normal	289,388	34,715,233	25,626,368	(9,378,253)
Juni	Normal	280,424	9,378,253	5,613,930	(4,044,747)
Juni	Pembetulan 1	280,424	9,378,253	5,613,930	(4,044,747)
Juli	Normal	2,622,821	4,044,747	8,666,259	1,998,691
Juli	Pembetulan 1	2,622,821	4,044,747	8,666,259	1,998,691
Agustus	Normal	287,597	-	13,689,463	13,401,866
Agustus	Pembetulan 1	287,597	-	13,689,463	13,401,866
September	Normal	284,276	-	21,036,667	20,752,391
September	Pembetulan 1	284,276	-	20,361,208	20,076,932
Oktober	Normal	293,708	-	2,204,982	1,911,274
Oktober	Pembetulan 1	293,708	-	2,204,982	1,911,274
November	Normal	1,770,578	1,048,220	14,166,778	11,297,980
November	Pembetulan 1	1,770,578	1,048,220	14,166,778	11,297,980
Desember	Normal	540,536	-	15,526,238	14,985,702

Pada tanggal 31 Desember 2010 terdapat saldo hutang pajak yang terdiri dari hutang PPN sebesar Rp 14.985.702.

Berikut adalah laporan neraca periode Desember 2010, dapat dilihat pada tabel .9.

Tabel .9: Neraca Periode 31 Desember 2010

Aktiva	Jumlah (Rp)	Kewajiban dan Ekuitas	Jumlah (Rp)
Aktiva Lancar :		Kewajiban Lancar :	
Kas	2.946.620.123	Hutang Usaha	1.975.167.513
Piutang Usaha	638.057.942	Hutang Bank	905.621.447
Biaya dibayar dimuka	512.023.646	Hutang Pajak	26.381.113
Piutang Lain-lain	210.203.345	Hutang Lain-lain	4.589.425.633
Security Deposits	105.263.435	Total Hutang Lancar	7.496.595.706
Persediaan	773.425.139	Hutang Jangka Panjang :	
Total Aktiva Lancar	5.185.593.630	Hutang Leasing	96.616.546
Aktiva Tetap :		Total Hutang Jangka Panjang	96.616.546
Kendaraan	2.525.294.400	Ekuitas :	
Inventaris	1.040.930.551	Modal	2.000.000.000
Harga Perolehan	3.566.224.951	Saldo Rugi	(2.304.646.576)
Akm. Penyusutan	(1.463.252.905)	Total Ekuitas	(304.646.576)
Nilai Buku	2.102.972.046	Total Kewajiban dan Ekuitas	7.288.565.676
Total Aktiva	7.288.565.676		

Dari neraca diatas, terdapat hutang pajak sebesar Rp 26.381.113. Nilai tersebut terdiri dari hutang PPN sebesar Rp 14.985.702.

REKONSILIASI PAJAK KELUARAN DENGAN PERKIRAAN PENJUALAN

Laporan Laba Rugi dimulai dengan data penjualan yang terjadi selama satu periode atau satu tahun takwim. Dalam Laporan Laba Rugi PT. Duta Firza tahun 2010, tercantum jumlah seluruh penjualan sebesar Rp 11.877.509.110, sedangkan jumlah seluruh penjualan PT. Duta Firza yang tercantum dalam laporan pajak sebesar Rp 11.824.396.841. Berikut adalah laporan laba rugi PT. Duta Firza untuk tahun yang berakhir Desember 2010, dapat dilihat pada tabel .10.

Tabel .10: Laporan Laba Rugi PT. Duta Firza untuk Desember 2010

Keterangan	Komersil	Koreksi Fiskal	Fiskal
Pendapatan :			
Pendapatan Trading			
Pendapatan Konsorsium	11.877.509.110	-	11.877.509.110
Jumlah Pendapatan	<u>945.197.415</u>	<u>(945.197.415)</u>	-
Harga Pokok Penjualan	12.822.706.525	-	11.877.509.110
Laba Kotor	<u>11.460.438.478</u>	<u>2.108.934.745</u>	<u>9.351.503.733</u>
Beban Usaha	1.362.268.047	1.163.737.330	2.526.005.377
Laba Usaha (Rugi)	<u>3.480.690.002</u>	<u>1.005.131.093</u>	<u>2.475.558.909</u>
Pendapatan (Beban) diluar Usaha	(2.118.421.955)	2.168.868.423	50.446.468
Laba Rugi sebelum Pajak	<u>(19.802.829)</u>	<u>(3.690.963)</u>	<u>(23.493.792)</u>
Pajak Penghasilan	(2.138.224.784)	2.165.177.460	26.952.676
Laba (Rugi) setelah Pajak	<u>6.738.000</u>		
Saldo Rugi Tahun Lalu	(2.144.962.784)		
Saldo Rugi	<u>(159.683.792)</u>		
	(2.304.646.576)		

Jumlah seluruh penjualan yang ada dilaporan pajak SPT Masa harus sama dengan Jumlah seluruh penjualan yang ada dilaporan keuangan PT. Duta Firza, tetapi pada PT. Duta Firza antara jumlah seluruh penjualan yang ada dilaporan pajak dengan jumlah seluruh penjualan yang ada dilaporan keuangan terjadi perbedaan sebesar Rp 53.112.269. Selisih tersebut timbul dikarenakan PT. Duta Firza dalam kegiatan penjualannya menggunakan USD sehingga terjadi selisih *kurs* antara pencatatan pajak dengan pencatatan untuk laporan keuangan. Dalam pencatatannya, PT. Duta Firza menggunakan *kurs* tengah Bank Indonesia pada akhir bulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dari tugas akhir yang berjudul “Analisis Penerapan SPT Masa PPN dan Hubungannya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Duta Firza”. Maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan dan pelaporan SPT Masa PPN PT. Duta Firza telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Dalam hal pelunasan kewajiban pembayaran pajaknya, PT. Duta Firza melunasi dan melakukan pelaporan tepat waktu. PT. Duta Firza telah melaporkan seluruh pengkreditan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dengan menggunakan SPT Masa PPN dan dalam bentuk formulir 1108 beserta lampiran lembar ke 3 SSP PPN dan telah melaporkan tepat pada waktunya tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan yaitu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2. Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT. Duta Firza sehubungan dengan pembayaran PPN setiap bulannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
3. Terdapat hubungan antara jumlah penjualan pada Laporan Keuangan PT. Duta Firza dengan Laporan SPT Masa PPN. Total seluruh penyertaan/penjualan yang dilaporkan ke pajak selama tahun 2010 telah dilaporkan sesuai dengan laporan penjualan PT. Duta Firza, namun terjadi perbedaan selisih kurs sehingga terdapat selisih antara total penjualan menurut laporan keuangan dengan total seluruh penyertaan pada laporan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap PT. Duta Firza, maka dapat dikemukakan beberapa saran sehubungan dengan perpajakan khususnya dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Perusahaan hendaknya selalu mengikuti segala perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam hal perpajakan, khususnya dalam hal perubahan peraturan perpajakan karena peraturan perpajakan sering kali berubah sehingga perusahaan harus sering *up date* dalam mengikuti peraturan perpajakan.
2. Perusahaan harus lebih teliti dalam hal kelengkapan dan kebenaran faktur pajak yang diterima maupun yang dibuat perusahaan. Selain itu, perusahaan harus lebih teliti dalam hal melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN supaya tidak terjadi pembetulan SPT Masa PPN yang terlalu sering.
3. Sebaiknya dalam penghitungan PPN perusahaan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan faktur penjualan agar tidak terjadi *double entry* dalam pencatatan Pajak Keluaran atau Pajak Masukan dan juga untuk menghindari kesalahan apabila ada penggantian *commercialinvoice* sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan dalam pelaporan SPT Masa PPN.
4. Pegawai yang bertugas dalam merekap PPN setiap bulannya harus lebih teliti lagi sebelum melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak dan tugas pegawai yang bersangkutan harus diperiksa oleh atasannya.

Daftar Pustaka

Agung,Mulyo, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, LP3I, 2007.

Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Edisi 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta, 2007.

Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Terkait Dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan Terkait Dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.

Waluyo,*Perpajakan Indonesia*, Edisi 5, Buku 1, Jakarta, Salemba Empat, 2005.

Waluyo,*Perpajakan Indonesia*, Edisi 6, Buku 1, Jakarta, Salemba Empat, 2006.

Waluyo,*Perpajakan Indonesia*, Edisi 6, Buku 2, Jakarta, Salemba Empat, 2006.

Sumber-sumber lain :

Ortax, 2011, *Pajak Pertambahan Nilai*, <http://www.ortax.org/ortax/>, 10 Juli 2011, 19.30 WIB

Pajak, 2011, *Pajak Pertambahan Nilai*, <http://pajak.go.id/>, 10 Juli 2011, 19.45 WIB